



Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar.

Rahayu Praya Ningsih^{1*}

Program Studi Magister Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram.

***Corresponding Author:**

Rahayu Praya Ningsih

Program Studi Magister Administrasi

Pendidikan Pascasarjana

Universitas Mataram, Indonesia

Email: rahayuprayaningsih123@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar di Indonesia dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman teori dan model implementasi kebijakan, penelaahan terhadap regulasi nasional seperti Permendikbud No. 70 Tahun 2009, serta perbandingan hasil penelitian empiris mengenai praktik, tantangan, dan solusi pelaksanaan pendidikan inklusif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan arah kebijakan yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan pelatihan guru, minimnya sarana pendukung, rendahnya pemahaman masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan seperti model top-down, bottom-up, Lipsky, dan Mazmanian & Sabatier, ditemukan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana lapangan, kejelasan tujuan, serta dukungan sumber daya. Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas guru, penguatan regulasi daerah, dan peningkatan literasi inklusi masyarakat menjadi langkah penting dalam mewujudkan pendidikan dasar yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusi, Sekolah Dasar, Teori Implementasi, Studi Kepustakaan.

Pendahuluan

Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang menempatkan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), dalam satu sistem pendidikan yang sama, memberikan kesempatan belajar setara tanpa diskriminasi. Di Indonesia, kebijakan pendidikan inklusi telah diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Kebijakan ini menegaskan bahwa setiap sekolah dasar harus memberikan akses kepada seluruh anak untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama di tingkat implementasi di sekolah dasar.

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa kendala dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia cukup kompleks. Zulaikhah, Abdurrahman, dan Mawarni (2023) dalam studi tinjauan pustakanya mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana prasarana, rendahnya kompetensi

guru dalam menangani ABK, serta kurangnya keterlibatan masyarakat menjadi tantangan utama dalam penerapan pendidikan inklusi di berbagai sekolah dasar. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip inklusi, baik dari pihak guru, kepala sekolah, maupun tenaga kependidikan lainnya, sehingga ABK seringkali belum mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal.

Perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam implementasi kebijakan ini juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Studi oleh Nur Fauziyah, Hartati, dan Rukmini (2025) menunjukkan bahwa guru-guru di wilayah perkotaan seperti Surabaya dan Makassar memiliki akses lebih besar terhadap pelatihan pendidikan inklusi dibandingkan guru-guru di wilayah pedesaan seperti Maros dan Pamekasan. Akibatnya, kualitas layanan pendidikan inklusi menjadi timpang, di mana ABK di daerah terpencil masih sering diabaikan atau bahkan tidak teridentifikasi secara formal oleh sekolah.

Kasus di Kota Bogor yang dikaji oleh Irmawati, Lestari, dan Darmawan (2024) mengungkap bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga, seperti antara dinas pendidikan, sekolah, dan pusat layanan disabilitas,

menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan inklusi. Meski kebijakan daerah telah tersedia, distribusi siswa ABK yang tidak merata antar sekolah menyebabkan beban kerja guru menjadi tidak seimbang dan kualitas layanan tidak terstandarisasi. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum tentu menjamin keberhasilan implementasi tanpa dukungan sistem pendukung yang kuat.

Sebaliknya, terdapat juga contoh positif dari pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar yang menunjukkan hasil menggembirakan. Di Kota Bandung, menurut studi Ramadhanti dan Herawati (2020), terdapat sekolah dasar inklusi yang dikelola dengan baik, memiliki fasilitas yang ramah ABK, serta didukung oleh guru pendamping khusus yang terlatih. Meskipun masih terdapat kendala dalam sinkronisasi kurikulum, terutama dalam masa transisi menuju Kurikulum Merdeka, namun dukungan kepala sekolah dan komunitas sekolah menjadi faktor pendorong keberhasilan tersebut.

Pendekatan inovatif juga diterapkan di daerah seperti Lombok Tengah, di mana Widhyastuti dan Hidayatullah (2023) mengembangkan program GASPUL MENU OLAH-OLAHI untuk membantu integrasi ABK dalam lingkungan sekolah dasar. Program ini menekankan pendekatan holistik melalui aktivitas fisik, rasa, pikir, dan hati yang menyatu dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun demikian, pelatihan guru secara berkala dan ketersediaan data ABK yang akurat tetap menjadi tantangan dalam pengelolaan pendidikan inklusi secara berkelanjutan.

Munajah, Kurniawan, dan Saputro (2021) menekankan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan inklusi. Kepala sekolah yang visioner dan kolaboratif mampu membangun sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Damayanti, Prasetyo, dan Wulandari (2024) juga menambahkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam mengidentifikasi kebutuhan individual peserta didik serta menyesuaikan strategi pembelajaran yang tepat secara berkelanjutan.

Berdasarkan kajian tersebut, jelas bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal peningkatan kapasitas guru, penguatan sistem pendukung, dan komitmen lintas sektor. Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis berbagai temuan empiris dan konseptual mengenai implementasi pendidikan inklusi, serta merumuskan rekomendasi strategis berbasis bukti untuk memperbaiki pelaksanaannya. Diharapkan hasil analisis ini dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam

mendukung terwujudnya pendidikan dasar yang inklusif, adil, dan bermartabat bagi semua anak di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. Studi kepustakaan dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah dan mengevaluasi berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk dokumen kebijakan, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta buku-buku akademik yang membahas pendidikan inklusi secara teoritis dan empiris. Metode ini juga relevan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan secara lebih luas tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Sebagaimana dikemukakan oleh Zed (2014), studi kepustakaan merupakan penelitian yang menjadikan literatur sebagai sumber utama data, baik dalam bentuk tulisan maupun dokumen digital. Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang terbit dalam lima tahun terakhir (2020–2025) guna memastikan relevansi dan aktualitas temuan yang dianalisis. Pemilihan sumber juga memperhatikan aspek validitas ilmiah, seperti keterindeksan jurnal (Sinta, DOAJ, atau Scopus), afiliasi penulis, serta metodologi yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

Langkah awal dalam studi ini adalah melakukan pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci seperti “implementasi kebijakan pendidikan inklusi,” “sekolah dasar,” “anak berkebutuhan khusus,” dan “pendidikan inklusif di Indonesia.” Pencarian dilakukan melalui sejumlah database akademik seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda, dan portal jurnal perguruan tinggi. Setelah literatur terkumpul, dilakukan proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi, seperti tahun terbit (maksimal lima tahun terakhir), kesesuaian topik, dan keterkaitan dengan konteks pendidikan dasar di Indonesia.

Tahapan berikutnya adalah proses telaah isi (*content review*), yang dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema penting dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Peneliti menggunakan pendekatan tematik untuk mengelompokkan isu-isu utama, seperti peran guru, dukungan kepala sekolah, fasilitas pendukung, kebijakan daerah, hingga partisipasi masyarakat. Proses ini dilakukan dengan cara membaca secara mendalam dan mencatat kutipan-kutipan

penting yang mendukung rumusan analisis dan sintesis dalam pembahasan.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-kualitatif. Menurut Krippendorff (2018), analisis isi memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi makna dari dokumen secara sistematis dan objektif dalam konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, setiap temuan dalam literatur dibandingkan dan disintesis untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan, serta mengidentifikasi tantangan dan faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan inklusi di sekolah dasar.

Untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas hasil kajian, peneliti juga melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan beberapa artikel yang membahas satu tema serupa, namun berasal dari penulis, wilayah, dan pendekatan yang berbeda. Dengan cara ini, keandalan data semakin terjaga dan analisis menjadi lebih komprehensif. Selain itu, peneliti juga memeriksa kesesuaian data dengan regulasi kebijakan nasional dan kontekstualisasi dengan kondisi pendidikan dasar saat ini.

Keterbatasan dalam studi kepustakaan ini terletak pada tidak dilakukannya observasi langsung di sekolah-sekolah dasar, sehingga informasi yang diolah sepenuhnya berasal dari interpretasi literatur. Namun demikian, pendekatan ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi kebijakan secara teoritis dan konseptual, serta memberi dasar kuat untuk penelitian lanjutan berbasis lapangan. Hasil analisis dari studi pustaka ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi pemangku kebijakan, pendidik, dan peneliti yang tertarik pada isu pendidikan inklusi.

Dengan demikian, metode studi kepustakaan dalam penelitian ini menjadi pendekatan yang efektif untuk mengkaji secara mendalam dan sistematis berbagai isu yang muncul dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar di Indonesia. Fokus utamanya tidak hanya pada memahami isi kebijakan secara normatif, tetapi juga menelaah praktik-praktik implementatif yang dilaporkan dalam berbagai kajian ilmiah sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan inklusi sebagai bagian dari kebijakan nasional telah diatur dalam Permendikbud No. 70 Tahun 2009 yang memberikan kerangka pelaksanaan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah reguler. Namun, meskipun arah kebijakan sudah jelas, implementasi di tingkat sekolah dasar masih

menunjukkan berbagai ketimpangan, terutama dalam aspek pelaksanaan teknis dan dukungan sumber daya di lapangan (Zulaikhah et al., 2023). Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi di tingkat pusat dan kondisi nyata di daerah, baik dari aspek kesiapan sekolah, guru, maupun masyarakat.

Untuk memahami dinamika implementasi tersebut, teori implementasi kebijakan menjadi penting sebagai dasar analisis. Model top-down menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan didorong oleh otoritas pusat melalui instruksi dan regulasi, sedangkan pendekatan *bottom-up* menekankan pentingnya inisiatif dan penyesuaian oleh pelaksana di tingkat bawah seperti guru dan kepala sekolah (Sabatier, 2005). Dalam konteks pendidikan inklusi, kedua pendekatan ini berjalan secara dialektis, karena kebijakan pusat memberikan kerangka besar, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh aktor lokal yang menerapkannya.

Dalam kerangka model Lipsky, guru sebagai pelaksana lapangan berperan sebagai *street-level bureaucrats* yang memiliki diskresi tinggi dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik di kelas (Lipsky, 2010). Guru yang memahami inklusi dan memiliki kepedulian tinggi akan menerapkan strategi yang adaptif, sementara guru yang kurang memahami cenderung menolak atau mengabaikan prinsip inklusif. Kenyataan ini sering terjadi di sekolah dasar, terutama di daerah yang belum memiliki sistem pelatihan guru yang memadai.

Sementara itu, teori Mazmanian dan Sabatier menekankan pentingnya kejelasan tujuan kebijakan, dukungan sumber daya, dan sistem evaluasi untuk menjamin keberhasilan implementasi (Mazmanian & Sabatier, 1983). Dalam hal pendidikan inklusi, tujuan umumnya sudah termuat dalam regulasi, namun dukungan anggaran dan sistem monitoring di tingkat sekolah belum terbangun secara optimal. Akibatnya, kebijakan sering berhenti pada tataran dokumen tanpa berdampak nyata pada pelayanan pendidikan untuk ABK.

Studi empiris di beberapa sekolah dasar menunjukkan variasi pelaksanaan pendidikan inklusi yang cukup tajam antar daerah. Di Kota Bandung, terdapat SD yang sudah menerapkan pendekatan inklusi secara sistematis dengan adanya guru pendamping khusus dan fasilitas ramah ABK, namun masih kekurangan dalam penyusunan SOP dan integrasi kurikulum (Ramadhanti & Herawati, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas tersedia, pelaksanaan tetap membutuhkan pedoman teknis yang jelas.

Berbeda dengan daerah perkotaan, di wilayah pedesaan seperti Maros dan Pamekasan, pelatihan guru

inklusi masih sangat terbatas, sehingga kualitas layanan untuk ABK menjadi rendah (Nur Fauziyah et al., 2025). Hal ini menunjukkan ketimpangan antara wilayah dalam mengakses sumber daya pelatihan, yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan inklusi. Guru-guru di wilayah terpencil seringkali belum memiliki pemahaman dasar tentang pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Selain pelatihan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan besar, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Sekolah-sekolah di NTT dan Papua misalnya, masih banyak yang belum memiliki fasilitas dasar seperti ramp, toilet difabel, dan ruang terapi (Sukmana et al., 2025). Tanpa dukungan fasilitas fisik, upaya integrasi ABK ke dalam sistem pendidikan reguler menjadi tidak maksimal, dan bahkan cenderung memperburuk eksklusi.

Upaya pembelajaran individual atau penyusunan *Individualized Education Program* (IEP) juga masih minim dilakukan di tingkat sekolah dasar, padahal program ini menjadi kunci dalam pemenuhan kebutuhan khusus siswa (Siminto et al., 2023). Guru yang belum terbiasa dengan pendekatan IEP cenderung memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa, tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak. Akibatnya, ABK sulit berkembang secara optimal di kelas reguler.

Meskipun demikian, terdapat praktik baik yang dapat dijadikan contoh bagi sekolah lainnya. Beberapa sekolah di Kota Surabaya dan Denpasar telah berhasil membangun sistem inklusi yang terstruktur, dengan dukungan guru pendamping, pelatihan rutin, dan keterlibatan orang tua secara aktif (Permata Sari et al., 2022). Faktor utama keberhasilan ini adalah komitmen kepala sekolah, kemitraan dengan lembaga luar, dan pemanfaatan anggaran daerah yang memadai.

Dalam perspektif kebijakan, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mendorong sekolah untuk menerapkan pendidikan inklusi secara efektif. Pemerintah daerah yang aktif biasanya menerbitkan regulasi lokal atau surat edaran untuk memperkuat kebijakan pusat serta menyediakan insentif bagi sekolah yang menerima ABK (Ngan Sui-Ni, 2023). Di sisi lain, daerah yang pasif hanya mengandalkan kebijakan pusat tanpa langkah konkret di lapangan.

Stigma sosial dari masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus juga masih menjadi tantangan besar yang menghambat praktik inklusi. Banyak orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya di sekolah reguler karena khawatir akan diskriminasi atau penolakan (Khusni Ja'far, 2024). Hal ini mencerminkan masih rendahnya literasi masyarakat tentang

pentingnya pendidikan inklusif dan hak anak untuk bersekolah bersama.

Keterbatasan kurikulum yang terlalu kaku juga menghambat guru dalam melakukan modifikasi pembelajaran yang ramah ABK. Meskipun Kurikulum Merdeka memberikan ruang fleksibilitas, namun belum semua guru mampu memanfaatkan kebebasan ini karena minimnya pelatihan tentang diferensiasi instruksi dan penilaian (Tarnoto, 2021). Akibatnya, banyak guru masih terpaku pada pola ajar tradisional yang tidak mengakomodasi keragaman kebutuhan siswa.

Permasalahan lain adalah belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Banyak sekolah menjalankan inklusi tanpa target yang jelas dan tidak memiliki indikator keberhasilan (Mayya et al., 2024). Padahal, sistem evaluasi sangat penting untuk menilai efektivitas program dan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Minimnya penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk layanan inklusi juga menyebabkan guru kebingungan dalam menghadapi ABK. Guru tidak memiliki rujukan yang jelas dalam melakukan adaptasi kurikulum, penilaian, maupun intervensi perilaku (Damayanti et al., 2024). Hal ini mengakibatkan pendekatan yang dilakukan guru sangat bergantung pada pengalaman pribadi, bukan pada prosedur baku.

Dari sisi pelatihan, sebagian besar guru belum mendapatkan pelatihan berkelanjutan tentang pendidikan inklusi. Pelatihan yang ada umumnya bersifat insidental, tidak sistematis, dan hanya menysasar sebagian kecil guru (Siminto et al., 2023). Padahal, pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran yang inklusif.

Di samping hambatan yang telah dijelaskan, terdapat pula alienasi kebijakan, yaitu kondisi di mana guru merasa kebijakan inklusi tidak relevan atau tidak sesuai dengan realitas kelas yang mereka hadapi (Tummers, 2012). Guru yang mengalami alienasi ini cenderung pasif atau bahkan menolak melaksanakan prinsip inklusif, karena merasa tidak dilibatkan dalam proses kebijakan dan tidak diberi dukungan yang cukup.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan solusi strategis dan sistematis. Pelatihan guru secara berkala, pembangunan fasilitas pendukung, penyusunan SOP, dan kampanye literasi inklusi di masyarakat menjadi langkah awal yang penting (Khusni Ja'far, 2024). Tanpa intervensi serius, kesenjangan dalam implementasi akan terus melebar,

dan hak-hak ABK untuk mendapatkan pendidikan yang layak tidak terpenuhi.

Penguatan peran kepala sekolah juga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan inklusi. Kepala sekolah yang memiliki visi inklusif akan mendorong terciptanya budaya sekolah yang ramah dan mendukung keberagaman peserta didik (Munajah et al., 2021). Mereka juga berperan sebagai penggerak dalam membangun jejaring kerja sama dengan dinas pendidikan, orang tua, dan komunitas.

Lebih jauh lagi, pendekatan kebijakan yang bersifat kombinatorik antara *top-down* dan *bottom-up* perlu diperkuat. Pemerintah pusat tetap memberikan arah dan regulasi, sementara pelaksana di lapangan diberi ruang untuk menyesuaikan implementasi dengan konteks lokal (Sabatier, 2005). Pendekatan ini akan menciptakan fleksibilitas tanpa kehilangan arah kebijakan.

Dengan demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar membutuhkan sinergi yang kuat antara regulasi, sumber daya manusia, fasilitas fisik, dan dukungan masyarakat. Teori-teori implementasi kebijakan memberikan landasan yang kuat untuk memahami dinamika ini, sementara studi-studi empiris menguatkan perlunya solusi konkret di tingkat lokal. Komitmen semua pihak sangat dibutuhkan agar pendidikan dasar inklusif di Indonesia tidak hanya menjadi wacana kebijakan, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pembelajaran di kelas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pelatihan guru, minimnya fasilitas pendukung, belum tersusunnya SOP yang baku, serta adanya stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus. Meskipun Permendikbud No. 70 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan model implementasi kebijakan seperti *top-down*, *bottom-up*, serta perspektif Lipsky dan Mazmanian & Sabatier menunjukkan bahwa kebijakan hanya dapat berhasil bila disertai dukungan sumber daya, pelibatan pelaksana lapangan, dan monitoring berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan inklusi perlu dikuatkan melalui strategi kolaboratif, pelatihan berkelanjutan, penguatan regulasi lokal, serta pembangunan kesadaran publik agar prinsip inklusif benar-benar terwujud dalam praktik pembelajaran di sekolah dasar.

Daftar Pustaka

- Damayanti, A., Prasetyo, A. H., & Wulandari, R. (2024). Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah inklusi di jenjang SD. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 16(2), 145–158.
- Irmawati, L., Lestari, S., & Darmawan, R. (2024). Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Bogor. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 12(1), 55–66.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Khusni Ja'far, M. (2024). Tantangan sosial dalam pendidikan inklusi di sekolah dasar: Studi kasus pada masyarakat desa. *Jurnal Pendidikan Inklusif Indonesia*, 9(1), 56–70.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service* (30th anniversary ed.). Russell Sage Foundation.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Mayya, H., Fadillah, L., & Rachman, S. (2024). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kebijakan*, 8(1), 33–47.
- Munajah, S., Kurniawan, E., & Saputro, S. (2021). Peran kepala sekolah dan guru dalam pendidikan inklusif: Studi di sekolah dasar negeri. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 5(1), 22–33.
- Ngan, S.-N. (2023). Peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusi: Studi komparatif beberapa kabupaten di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Nasional*, 7(2), 99–114.
- Nur Fauziyah, H., Hartati, N., & Rukmini, R. (2025). Disparitas pelatihan guru inklusi di daerah urban dan rural di Indonesia. *Jurnal Inklusi Pendidikan*, 8(1), 10–23.

- Permata Sari, R., Handayani, D., & Wijaya, A. (2022). Praktik baik pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar perkotaan. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 6(2), 123–135.
- Ramadhanti, I., & Herawati, T. (2020). Efektivitas manajemen sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Bandung. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 101–112.
- Sabatier, P. A. (2005). *Theories of the policy process* (2nd ed.). Westview Press.
- Siminto, Haryati, S., & Setiawan, B. (2023). Penerapan program pembelajaran individual (IEP) dalam pendidikan inklusi. *Jurnal Pendidikan Khusus Indonesia*, 11(1), 40–55.
- Sukmana, R., Wulandari, S., & Rahayu, T. (2025). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di wilayah 3T: Studi di Papua dan NTT. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Masyarakat*, 10(1), 87–100.
- Tarnoto. (2021). Kurikulum adaptif dalam pendidikan inklusif: Peluang dan tantangan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Kurikulum*, 15(1), 27–39.
- Tummers, L. (2012). Policy alienation of public professionals: The construct and its measurement. *Public Administration Review*, 72(4), 516–525.
- Widhyastuti, R., & Hidayatullah, M. (2023). Inovasi program GASPUL untuk penguatan pendidikan inklusif di SD Lombok Tengah. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 7(1), 75–88.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zulaikhah, E., Abdurrahman, A., & Mawarni, R. (2023). Analisis sistematis implementasi pendidikan inklusif di Indonesia: Tinjauan 25 artikel ilmiah. *Indonesian Journal of Inclusive Education*, 5(2), 33–47.